

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**2013-2017**

**Skripsi**



Ditulis Oleh:

Nama : Lulu Insyamsiati

Nomor Mahasiswa : 141214904

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2018

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
2013-2017**

**Skripsi**

Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta



Nama : Lulu Insyamsiati  
Nomor Mahasiswa : 141214904  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA  
YOGYAKARTA

2018

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Lulu Insyamsiati

NIM : 141214904

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bantul 2015-2017

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

Penulis

Lulu Insyamsiati

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL**  
**PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**2013-2017**

Nama : Lulu Insyamsiati  
Nomor Mahasiswa : 141214904  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Yogyakarta,

Telah di setujui dan di sahkan oleh

Dosen Pembimbing

Zulkifli SE., MM

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini:

Untuk Ibundaku tercinta, terimakasih telah memberikan kami pendidikan yang teramat sangat baik. Terimakasih telah menjadi ibu dan ayah yang baik untuk kami. Untuk almarhum ayah terimakasih selalu jadi ayah terbaik dalam hidup kami, semua kenangan tentang ayah tidak akan terlupakan. Untuk adikku tercinta rahmat hidayat, cepat nyusul kakak ke jenjang yang lebih baik. Untuk nenek terimakasih telah membantu ibu membanting tulang untuk biaya pendidikan kami.

Maafkan almarhum ayah, ibu dan nenek kalau saya belum dapat memberikan yang terbaik.

## MOTTO

“Sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar diantara kamu sekalian” (QS. Muhammad : 31)

Kunci dalam hidup adalah berjuang, berusaha, berdoa dan sabar mereka yang dapat melakukan itu niscaya Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik untuknya.

Sukses dapat dilihat dari seberapa sayang dan hormat kalian terhadap orang tua.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

**ABSTRAK**

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
2013-2017**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai Belanja Modal memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian lain perlu dilakukan untuk menguji ulang teori tentang Belanja Modal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Laporan PAD periode 2013- 2017. Sampel penelitian adalah data laporan pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal dari tahun 2013-2017. Data penelitian ini berupa data sekunder. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan asumsi klasik menggunakan program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBSI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2013-2017”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju ridho-Mu. Amin
2. Almamater STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Drs.Muhammad Subkhan, MM. selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Bapak Zulkifli SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini,Se, M.Si selaku ketua jurusan akuntansi STIE Widya Wiwaha.
6. Dosen-dosen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
7. Pegawai dan staf STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
8. Teman-teman seperjuangan di kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.



9. Teristimewa untuk ayahanda saya Syamsir (Alm) dan ibunda tercinta Sutrismi yang telah banyak memberikan dukungan, nasihat dan doa kepada saya.
10. Semua pihak yang membantu dalam penelitian ini yang namanya tidak bisasaya sebutkan satu persatu saya sampaikan terimakasih atas segala bantuan yang diberikan.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak terkait. Amin.

**STIE Widya Wivaha**  
**Jangan Plagiat**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB IPENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3    TUJUAN PENELITIAN.....	6
1.4    MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1    LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1    Otonomi Daerah.....	8
2.1.2    Pajak Daerah .....	9
2.1.3    Retribusi Daerah.....	13
2.1.4    Belanja Modal .....	15
2.2    PENELITIAN TERDAHULU .....	17
2.3    RERANGKA KONSEPTUAL .....	21
2.4    HIPOTESIS PENELITIAN .....	21
2.4.1    Hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal .....	21

2.4.2	Hubungan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal .....	22
2.4.3	Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>24</b>
3.1	METODE PENELITIAN .....	24
3.2	TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN.....	25
3.3	BATASAN OPERASIONAL .....	25
3.3.1	Definisi Operasional.....	26
3.3.2	Variabel Independen .....	26
3.3.3	Variabel Dependen.....	27
3.4	POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN.....	28
3.5	JENIS DAN SUMBER DATA .....	28
3.6	METODE PENGUMPULAN DATA.....	29
3.7	METODE ANALISIS DATA.....	29
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	29
3.7.2	Uji Asumsi Klasik.....	30
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	33
3.7.4	Pengujian Hipotesis Penelitian.....	34
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>37</b>
4.1	Data Penelitian .....	37
4.2	Statistik Diskriptif.....	38
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	39
4.3.1	Uji Normalitas.....	39
4.3.2	Uji Multikolinearitas .....	41
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	42
4.3.4	Uji Autokorelasi.....	43

4.4	Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
4.5	Pengujian Hipotesis.....	46
4.5.1	Pengujian Parsial (Uji t).....	46
4.5.2	Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F).....	48
4.5.3	Analisis Koefisien Determinasi .....	49
BAB VKESIMPULAN DAN SARAN.....		53
5.1	Kesimpulan .....	53
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	54
5.3	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA .....		55
LAMPIRAN.....		57

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Daerah yang berada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada setiap daerah. Undang-Undang No 9 Tahun 2015 (revisi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola

sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki namun juga memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah. Dalam APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal yang ditujukan untuk meningkatkan investasi modal. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah maupun untuk publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena

belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pembentukan daerah otonom bertujuan untuk peningkatan daya guna penyelenggaraan pemerintah untuk melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Suatu daerah dituntut untuk memperoleh PAD secara mandiri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah pusat juga mempunyai kewajiban untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Keberhasilan kemampuan keuangan suatu daerah tercermin pada kemampuan daerah tersebut dalam menggali dan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja rutin pada pembangunan di daerah tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, Pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Dengan pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam, Pemerintah

Pusat dan pemerintah Daerah dapat mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang proporsional. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk pemerataan fiskal pada tiap daerah.

Fenomena yang terjadi bahwa otonomi daerah memberikan kebebasan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Namun kenyataannya Pemerintah Daerah belum siap dalam mengelola keuangan daerahnya. Dapat dilihat dari sedikitnya pengalokasian dana ke Belanja Modal.

#### Rencana dan Realisasi Belanja Kabupaten Bantul Tahun 2008

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>627.527.861.723,00</b>	<b>598.167.227.346,78</b>
	a. Belanja pegawai	491.538.098.432,00	468.562.523.987,00
	b. Belanja bunga	120.145.200,00	92.934.614,61
	c. Belanja hibah	11.190.000.000,00	11.190.000.000,00
	d. Belanja bantuan sosial	68.265.769.364,00	65.973.535.442,00
	e. Belanja bagi hasil kepada prop/kab/kota	1.824.216.600,00	1.882.216.600,00
	f. Belanja bantuan keuangan kepada prop/kab/kota/desa	48.958.858.615,00	47.104.875.180,00
	g. Belanja tidak terduga	5.630.773.512,00	3.421.141.797,17
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>475.042.380.077,00</b>	<b>447.256.076.171,00</b>
	a. Belanja pegawai	47.272.805.950,00	42.306.374.948,00
	b. Belanja barang dan jasa	119.134.917.707,00	102.189.334.334,00



c. Belanja modal	308.634.656.420,00	302.760.360.899,00
<b>Total Belanja</b>	<b>1.102.570.241.800,00</b>	<b>1.045.423.303.527,78</b>

Pengeluaran Belanja Modal merupakan belanja yang manfaatnya paling terasa oleh publik. Dengan adanya peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti penataan kota, gedung, serta pembangunan jalan dan irigasi dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Namun, pada pelaksanaannya realisasi anggaran belanja modal masih lebih sedikit dibandingkan dengan belanja operasi yang secara kasar manfaatnya kurang dirasakan publik, misalnya pengeluaran yang dilakukan untuk pemberian gaji dan tunjangan kepegawaian.

Beberapa penelitian mengenai Belanja Modal telah dilakukan oleh banyak peneliti. Dan terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desianti (2015), menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, menurut Zulkautsar (2014), menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan menurut Sembiring (2013), menunjukkan hasil bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang dikemukakan di atas, yang akan menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan belanja modal pemerintahan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah.

2. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Otonomi Daerah

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan otonomi daerah oleh pemerintah pusat memiliki tujuan untuk kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan rumah tangganya. Dalam penerapannya pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh dan masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan dan menjadi komponen pendapatan daerah dalam APBD. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan setiap kegiatannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterapkannya otonomi daerah adalah untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air secara merata.

### 2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2005:7), Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan daerah terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak provinsi, yang terdiri dari:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok
- b. Pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari:
  1. Pajak hotel
  2. Pajak restoran
  3. Pajak hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak penerangan jalan
  6. Pajak parkir
  7. Pajak air tanah
  8. Pajak sarang burung walle
  9. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
  10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Berdasarkan terminologi yang digunakan dalam pajak daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badanyang mengusahakan hotel.

2. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
3. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
4. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
5. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi dan memiliki atau menguasai manfaat atas Bangunan.

Objek Pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan
2. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
3. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
4. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*
  - b. Reklame kain
  - c. Reklame melekat, stiker
  - d. Reklame selebaran
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
  - f. Reklame udara
  - g. Reklame apung
  - h. Reklame suara
  - i. Reklame film/*slide*
  - j. Reklame peragaan
5. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor



6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

### 2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2005:6), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Yani (2002:55), Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah meliputi:

- a. Jasa umum, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatatan Sipil

4. Retribusi pemakaman
  5. Retribusi pelayanan pasar
  6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  7. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  8. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  9. Retribusi pelayanan pendidikan
- b. Jasa usaha, yaitu retribusi pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
1. Pelayanan dengan menggunakan /memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
  2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  6. Retribusi penyebrangan di air
- c. Perizinan tertentu yaitu retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu meliputi:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin trayek
4. Retribusi izin usaha perikanan

#### 2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Menurut Mahsun (2013:24), Belanja Modal dibagi atas dua, yaitu:

1. Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya: pembangunan daerah, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
2. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya secara langsung oleh aparatur. Contohnya: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

Menurut Syaiful (2006:22), Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

##### a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas samapi jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Desianti (2015), telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Gultom (2011), telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara terhadap Belanja Modal.

Putro (2010), telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum

terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Sembiring (2013), telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Zulkautsar (2014), telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan Daerah melalui Belanja Modal pada Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Ringkasan review penelitian terdahulu yang peneliti uraikan terdapat pada

Tabel2.2

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Desianti (2015)	Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Aceh	Variabel Independen: - Pajak Daerah - Retribusi Daerah  Variabel Dependen: Belanja Modal	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.
2	Gultom	Pengaruh	Variabel Independen:	Pertumbuhan Ekonomi tidak

	(2011)	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Perimbangan</li> </ul> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<p>berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>
3	Putro (2010)	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa</p>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>- Pendapatan Asli Daerah</li> <li>- Dana Alokasi Umum</li> </ul> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<p>Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>

		Tengah)		
4	Sembiring (2013)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> </ul> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.
5	Zulkautsar (2014)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pembangunan Daerah melalui Belanja Modal pada Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak Daerah</li> <li>- Retribusi Daerah</li> </ul> <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.



## 2.3 RERANGKA KONSEPTUAL

Rerangka konseptual adalah suatu model yang menerapkan bagaimana hubungan teori dengan faktor-faktor yang penting telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.

Pengalokasian Belanja Modal merupakan hal yang penting karena Belanja Modal Pemerintah Daerah difokuskan untuk menambah aset daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian Belanja Modal diantaranya dari sektor Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Alasan pengambilan kedua variabel ini adalah karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan di daerah.

## 2.4 HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau penjelasan sementara yang belum bisa dibuktikan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah dugaan tersebut benar atau salah. Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, serta kerangka konseptual, maka hipotesis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 2.4.1 Hubungan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), Pajak Daerah dapat berupa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Tempat Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir.

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara Pajak Daerah dengan alokasi Belanja Modal. Semakin besar Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor Belanja Modal. Pajak Daerah dan Belanja Modal juga memiliki hubungan timbal balik.

Menurut Wong (2004:32), pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Pajak merupakan komponen PAD yang nilai tambahnya diperoleh dari sektor industri yang berkembang secara optimal. Sektor industri tersebut adalah berasal dari belanja modal. Strategi alokasi pada belanja modal akan mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.

H1: Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

#### 2.4.2 Hubungan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara, yaitu dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Jika

Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Harianto (2007), disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berupa Retribusi Daerah yang semakin tinggi akan merangsang Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

H2:Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

#### 2.4.3 Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja modal.

Kemandirian daerah salah satu cara untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah dapat meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

H3:Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan suatu penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode Deskriptif, penelitian bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Alat analisis yang digunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $x_1, \dots, x_2, \dots, x_n$ ) dengan variabel dependen ( $y$ ). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen, dimana variabel independen merupakan variabel bebas yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (variabel tergantung), sedangkan variabel dependen sebagai variabel terikat atau tergantung merupakan variabel atau disebabkan oleh adanya variabel bebas. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen, serta Belanja Modal sebagai variabel dependen.

### **3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari data sekunder yakni dokumen dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

### **3.3 BATASAN OPERASIONAL**

Penulis memberikan batasan di dalam pelaksanaannya agar tidak mengambang dari tujuannya dan batasan tertentu bertujuan agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Oleh karena itu, batasan operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dilakukan hanya di Kabupaten Bantul.
- b. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.
- c. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Tahun penelitian mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

### 3.3.1 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah menjelaskan karakter dari objek ke dalam elemen yang dapat di observasi sehingga suatu konsep dapat diukur di dalam penelitian (Erlina, 2011:48).

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas akan variabel yang dipakai dalam penelitian, sehingga dengan definisi yang jelas suatu variabel akan dapat diukur dengan logika empiris. Jika tidak memiliki definisi yang jelas maka akan menimbulkan pengertian yang berbeda, hal ini akan menimbulkan masalah. Untuk menguji penelitian ini digunakan variabel independen dan variabel dependen.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen.

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau penyebab variasi bagi variabel dependen (Erlina, 2011:37).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### a. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah total pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diterima setiap kota. Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

### 3.3.3 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang tidak bebas, dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas, dan merupakan konsekuensi dari variabel independen (Erlina, 2011:36).

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah Belanja Modal. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dalam satu periode akuntansi. Belanja modal

meliputi belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

### **3.4 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN**

Menurut Sangadji (2010:185), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja modal dari tahun 2013-2017 di Kabupaten Bantul.

Menurut Sangadji (2010:186), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang diambil dengan cara tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh peneliti. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian dengan maksud atau pertimbangan tertentu dari anggota populasi.

### **3.5 JENIS DAN SUMBER DATA**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Erlina (2011:22) data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak lain, sumber data sekunder misalnya buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya.

Sumber data peneliti adalah dari dokumen laporan anggaran APBD yang diperoleh dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).



### 3.6 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data sekunder dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

### 3.7 METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah regresi linear bergandengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2010 sebagai alat bantu dalam rangka mengolah data. Dalam analisis dengan menggunakan program komputer SPSS (*Statistical Package For Service Solutions*) meliputi analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis Penelitian.

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistika deskriptif umumnya digunakan untuk memberi informasi mengenai variabel penelitian yang utama. Menurut Erlina (2011:57), Ukuran yang digunakan berupa: frekuensi tendensi (rata-rata, median, modus), disperse (standar deviasi, variance) dan pengukur-pengukur bentuk (*measures of shape*).

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistic dengan menggunakan SPSS. Pengujian regresi linear berganda dilakukan setelah model dan penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

#### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Sebelum pengujian hipotesis digunakan, terlebih dahulu akan digunakan pengujian normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian.

Menurut Erlina (2011:89), Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki retribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji asumsi statistic t dan uji statistic F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti retribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada beberapa cara untuk menguji normalitas distribusi data dengan menggunakan alat bantu SPSS, yaitu:

##### a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat meyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Statistic Nonparametric-Kolmogrov Smirnov

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika angka signifikan  $>$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
2. Jika angka signifikan  $<$  taraf signifikan ( $\alpha$ ) 0,05 maka distribusi dapat dikatakan tidak normal.

c. Normal Probability Plot

Metode ini membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti diagonalnya.

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena jika hal tersebut terjadi maka variable-variabel tersebut tidak orthogonal atau terjadi kemiripan. Untuk melakukan pengujian apakah terdapat multikolinaritas atau tidak, dapat diketahui dengan menggunakan nilai tolerance dan lawannya *Variance*

*Inflation Factor* (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $> 0,1$  atau sama dengan VIF  $< 10$ .

### 3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006:90), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas sebagai berikut:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson

(DW). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini terjadi karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari observasi lainnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat pertama (*first order autokorelasi*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis adalah kesimpulan sementara antara hubungan dua variabel atau lebih. Hipotesis akan memberi arah proses pengumpulan data dan tentunya model analisisnya. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi keakutuan variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji statistik t dan uji statistik F. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$x_1$  = Pajak Daerah

$x_2$  = Retribusi Daerah

Langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

### 3.7.4 Pengujian Hipotesis Penelitian

#### 3.7.4.1 Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Nilai koefisien korelasi ( $R$ ) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai  $R$  lebih besar dari 0,5 atau mendekati 1.

Koefisien determinasi ( $R$  Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006:105). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R$  Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Belanja Modal). Begitu pula sebaliknya, nilai mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka  $R$  Square meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan nilai Adjusted  $R$  Square pada saat

mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti R Square, nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

#### 3.7.4.2 Uji signifikansi Simultan (F-test)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Tahap pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b. Menentukan besarnya nilai F hitung dan signifikan F (Sig F).
- c. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5%.
- d. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu:
  - 1) Jika nilai sig F  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan
  - 2) Jika nilai sig F  $\leq 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

### 3.7.4.3 Uji Signifikansi Parsial (t-test)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Tahap pengujian sebagai berikut:

- a.  $H_0: \beta = 0$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  $H_a: \beta \neq 0$ , berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap dependen secara parsial.
- b. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5%
- c. Jika probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap struktur modal, jika lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap belanja modal.



## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. ANALISIS PENELITIAN

##### 4.1 Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang menggunakan persamaan analisis linier berganda. Analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan *microsoft excel*, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian menggunakan analisis linier berganda. Pengujian asumsi klasik dan analisis linier berganda menggunakan *software SPSS* versi 16. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel-variabel penelitian ke program *SPSS* tersebut dan menghasilkan *output* sesuai dengan metode analisis data yang telah ditentukan.

**Tabel 4.1**

**Tabel Data Sampel Penelitian**

	X1 Pajak Daerah	X2 Rertribusi	Y Belanja Modal
2013	83.232.017.500.20	27.116.286.436.00	183.269.840.475.09
2014	99.558.470.705.00	26.004.713.221.00	310.415.290.766.00
2015	123.257.183.734.63	22.840.342.141.00	334.880.395.261.00
2016	133.474.742.165.22	26.613.085.433.67	284.060.532.661.95
2017	165.502.359.004.37	31.575.738.483.00	332.619.265.453.14

## 4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Dalam penelitian ini pengujian deskriptif yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, mean (rata-rata) dan data standar deviasi. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak_Daerah_X1	5	8.32E12	1.66E13	1.2100E13	3.17306E12
Retribusi_Daerah_X2	5	2.28E12	3.16E12	2.6830E12	3.13247E11
Belanja_Modal_Y	5	1.83E13	3.35E13	2.8905E13	6.25890E12
Valid N (listwise)	5				

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui:

1. Nilai minimum dari belanja modal adalah 183.269.840.475.09 dan nilai maksimum dari belanja modal adalah 334.880.395.261.00. Sementara rata-rata dan standar deviasi adalah 2.890.000.000.13 dan 6.258.000.000.12.
2. Nilai minimum dari pajak daerah adalah 83.232.017.500.20 dan nilai maksimum dari pajak daerah adalah 165.502.359.004.37. Sementara rata-rata dan standar deviasi adalah 1.210.000.000.13 dan 3.173.060.000.12.

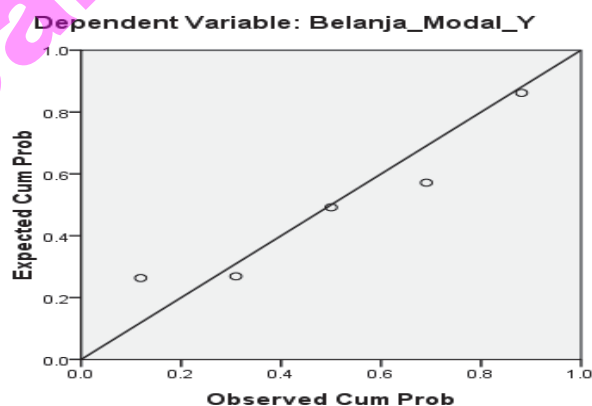
3. Nilai minimum dari retribusi daerah adalah 22.840.342.141.00 dan nilai maksimum dari retribusi daerah adalah 31.575.738.483.00. Sementara rata-rata dan standar deviasi adalah 2.683.000.000.12 dan 2.132.470.000.11.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

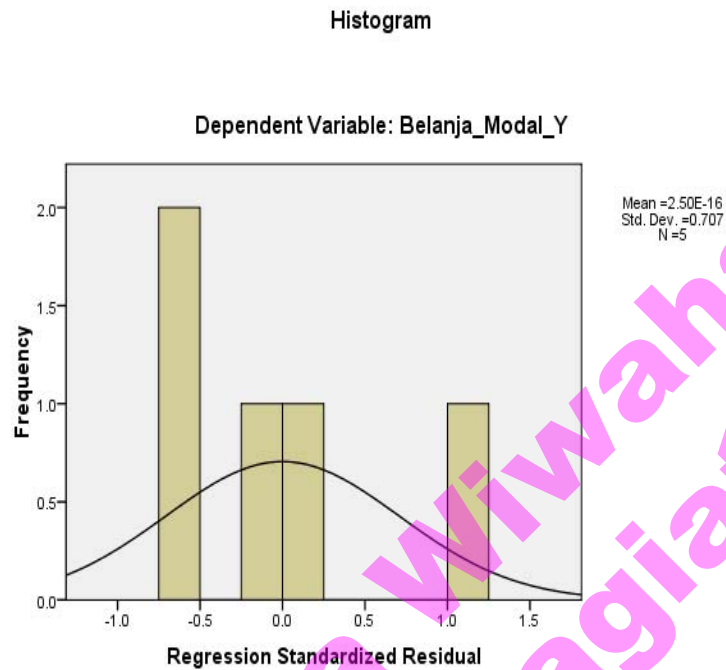
Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi secara normal. Jika data instrument penelitian terdistribusi secara normal maka telah memenuhi model regresi yang baik. Untuk menguji normalitas data penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot* yang membandingkan data distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Grafik *Normal Probability Plot* yang berdistribusi normal menunjukkan pola atau titik-titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3 Grafik Normal P-P Plot

Hasil uji normalitas juga dapat dilihat pada diagram histogram pada gambar 4.4



**Gambar 4.4 Histogram Normal P-P Plot**

Grafik histogram pada gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa distribusi data memiliki kurva berbentuk lonceng dimana distribusi data tidak menceng ke kiri maupun menceng ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Hal ini juga didukung dengan menggunakan *normal p-plot regression*.

Tabel 4.5

Uji Normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0016113
	Std. Deviation	3.48356494E12
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.185
Kolmogorov-Smirnov Z		.466
Asymp. Sig. (2-tailed)		.982

a. Test distribution is Normal.

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,982 karena nilai signifikan 0,982 lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

**4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Suatu model regresi yang baik selain data terdistribusi secara normal juga tidak mengalami Multikolinearitas. Multikolinearitas merupakan korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai *Variance Inflating Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Model

regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang mempunyai VIF <10 dan nilai tolerance > 0,1. Tabel berikut menyajikan hasil uji multikolinearitas.

**Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.432E13	2.129E13		1.612	.248		
Pajak_Daerah_X1	1.916	.908	.971	2.110	.169	.731	1.369
Retribusi_Daerah_X2	-10.658	9.200	-.533	-1.158	.366	.731	1.369

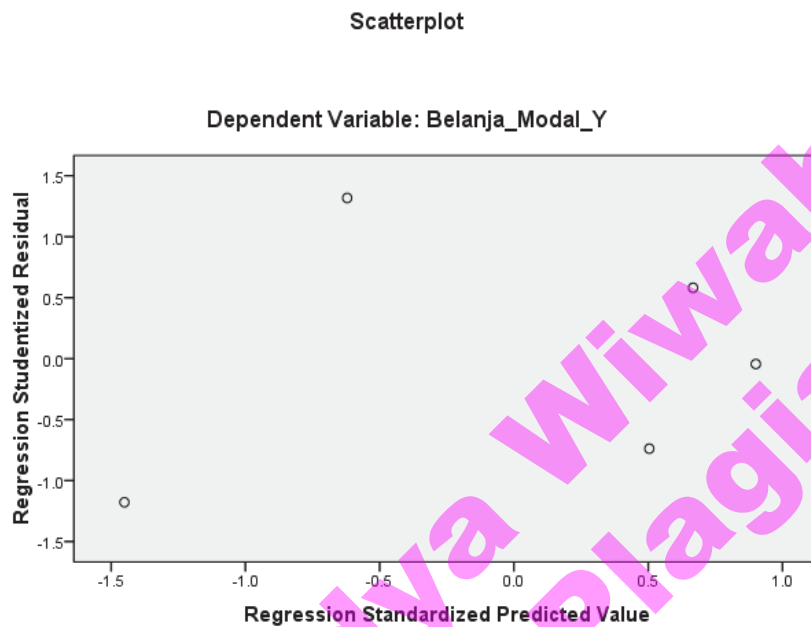
a. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y  
 Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai VIF setiap variabel dibawah 10 dan nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,1 sehingga tidak terdapat hubungan atau korelasi antara satu variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa data penelitian tidak mengalami multikolinearitas sehingga model regresi yang ada layak dipakai dalam memprediksi Belanja Modal.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Ghazali (2013), menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 4.7 Uji Heteroskedastisitas**

Perhatikan bahwa berdasarkan Gambar 4.7 tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson. Berikut hasil berdasarkan uji Durbin-Watson.

Tabel 4.8

Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.831 <sup>a</sup>	.690	.380	4.92650E12	2.589

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah\_X2, Pajak\_Daerah\_X1

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Nilai DW 2,589 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 5 dan jumlah variabel independen (k=2) = 2,5 maka diperoleh nilai du 1,6518. Nilai DW 2,589 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,6518 dan kurang dari (4-du) 4-1,6518 = 2,3482 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini dianalisis dengan model regresi linear berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal dengan model dasar sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

a = Konstanta



$b_1, b_2$  = Koefisien regresi

$e$  = error atau variabel gangguan

**Tabel 4.9**  
**Analisis Regresi Linier Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.432E13	2.129E13		1.612	.248
	Pajak_Daerah_X1	1.916	.908	.971	2.110	.169
	Retribusi_Daerah_X2	-10.658	9.200	-.533	-1.158	.366

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 3,432 + 1,916 X_1 - 10,658 X_2 + e$$

Keterangan:

1. Kostanta sebesar 3,432 menunjukkan bahwa apabila variabel independen bernilai 0 maka nilai belanja modal sebesar 3,432.
2.  $X_1$  adalah variabel pajak daerah yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,916. Hal ini mempunyai arti bahwa kenaikan 1% variabel pajak daerah maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 1,916 dengan asumsi variabel lain tetap.
3.  $X_2$  adalah variabel retribusi daerah yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar -10,658. Hal ini mempunyai arti bahwa kenaikan 1% variabel

retribusi daerah maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar - 10,658 dengan asumsi variabel lain tetap.

## 4.5 Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu pajak daerah ( $X_1$ ) dan retribusi daerah ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen yaitu belanja modal ( $Y$ ).

Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengujian yang digunakan adalah

1. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel } (n-k-1)$  maka  $H_0$  ditolak dan
2. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel } (n-k-1)$  maka  $H_0$  diterima.

Nilai t tabel dengan  $df = n - k - 1 = 5 - 2 - 1 = 2$  maka nilai t tabel diperoleh sebesar 2,91999. Selain itu uji t tersebut dapat pula dilihat dari besarnya *probabilitas value (p value)* dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ ). Adapun Kriteria pengujian yang digunakan adalah Jika  $p \text{ value} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan jika  $p \text{ value} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Pengujian Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.432E13	2.129E13		1.612	.248
	Pajak_Daerah_X1	1.916	.908	.971	2.110	.169
	Retribusi_Daerah_X2	-10.658	9.200	-.533	-1.158	.366

a. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y  
Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji t) dari tabel 4.8 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel pajak daerah memiliki nilai thitung < ttabel dimana  $2,110 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi 0,169 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal.
2. Variabel retribusi daerah memiliki nilai thitung < ttabel dimana  $-1,158 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi 0,366 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal.

#### 4.5.2 Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $n-k-1$ ) maka  $H_0$  ditolak maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $n-k-1$ ) maka  $H_0$  diterima maka secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel (Y).

Untuk melihat variabel independen berpengaruh secara signifikan dapat dilihat dengan signifikansi setiap variabel independen dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05.

1. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka pengaruh variabel independen tidak signifikan dan
2. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka pengaruh variabel independen signifikan.

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan 0,05,  $df_1 = \text{jumlah variabel} - 1 = 3 - 1 = 2$  dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) atau  $5 - 2 - 1 = 2$ , maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 19,00.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai F dan signifikansi secara simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.082E26	2	5.408E25	2.228	.310 <sup>a</sup>
	Residual	4.854E25	2	2.427E25		
	Total	1.567E26	4			

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah\_X2, Pajak\_Daerah\_X1

b. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Pada tabel 4.11 nilai F hitung < F tabel ( 2,228 < 19,00 ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,310 > 0,05 maka Ho diterima artinya pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

#### 4.5.3 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel tak bebas.

**Tabel 4.12**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 <sup>a</sup>	.690	.380	4.92650E12

a. Predictors: (Constant), Retribusi\_Daerah\_X2, Pajak\_Daerah\_X1

c. Dependent Variable: Belanja\_Modal\_Y

Sumber: data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai koefisien determinasi terletak pada kolom *Adjusted R-Square*. Diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,380. Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas yakni pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi variabel belanja modal sebesar 38%, dan sisanya sebesar 62% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## **B. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

1. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah sebesar 0,169 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Jadi, sesuai dengan hasil penelitian di atas semakin besar pajak daerah yang di peroleh pada kabupaten Bantul tidak meningkatkan jumlah alokasi belanja

modal untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Putro (2010) yang menyatakan bahwa kenaikan penerimaan pada komponen pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

## 2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bantul.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan retribusi daerah sebesar 0,366 yang lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 sehingga membuktikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini terjadi karena ada anggapan yang menekankan dan memperjelas bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan (Queen, 1998). Penelitian ini membuktikan bahwa belum sepenuhnya belanja daerah pada kabupaten Bantul digunakan bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama kenaikan penerimaan retribusi daerah tidak menyebabkan terjadinya peningkatan pada alokasi belanja modal.

## 3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bantul.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian

statistik menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 0,31 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zulkautsar (2013) yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan variabel pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dimana  $2,110 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi  $0,169$  lebih besar dari  $0,05$ .
2. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel dimana  $-1,158 < 2,91999$  dengan tingkat signifikansi  $0,366$  lebih besar dari  $0,05$ .
3. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel (  $2,228 < 19,00$  ) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,310 > 0,05$ .

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada Kabupaten Bantul saja, sehingga belum bisa membandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Yogyakarta.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada data sekunder. Konfirmasi langsung seperti wawancara dan kuesioner masih belum dilakukan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan keterbatasan penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penelitian mendatang sebaiknya juga dapat mengembangkan model penelitian dengan penambahan variabel penelitian yang lain seperti menambah variabel moderating atau variabel kontrol.
2. Memperluas sampel penelitian misalnya memperpanjang periode pengamatan dan menambahkan sampel pada Kabupaten lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Desianti. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Di Provinsi Aceh".
- Erlina, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi untuk Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD)*.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariancedengan Program SPSS, EdisiKetiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Gultom, Yulita. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara".
- Halim, Abdull. 2007. "Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah" Edward Tanujaya. Yogyakarta.
- Harianto dan Priyo Hari Ardi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28, Makassar*.
- Mahsun, Moh. Firman Sulistiyowati, Andre Purwanugraha. *Akuntansi Sektor Publik, edisi ketiga. BPFE. Yogyakarta*.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, 2010. *Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sembiring, Bayu Anggara. 2013. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara".
- Sianturi, Agave (2010) "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara".
- Solikin, 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
Jakarta:Grafindo.

Zulkautsar, Ahmad. 2014. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap  
Pembangunan Daerah melalui Belanja Modal pada Kabupaten Bener  
Meriah Provinsi Aceh”.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah.

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

**STIE Widya Wiwaha**  
**Jangan Plagiat**